

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi telah menjadi bagian penting dari dunia modern dan kita semakin bergantung padanya. Akibatnya, jumlah perangkat tumbuh dari hari ke hari. Faktanya, sekarang ada lebih banyak gawai di dunia daripada manusia. Menurut Gartner, salah satu perusahaan riset dan konsultan teknologi yang berbasis di Stamford memperkirakan bahwa titik persilangan terjadi ketika jumlah perangkat IoT di dunia mencapai 8,4 miliar pada 2017 (Tung, 2017). Mengetahui bahwa populasi dunia saat ini diestimasikan mencapai 7,6 miliar (*World Population Clock*, 2020), jelas bahwa kecuali kita semua memutuskan untuk melakukan detoks digital permanen, mulai sekarang akan selalu ada lebih sedikit manusia di bumi daripada gawai.

Ketergantungan kita terhadap perangkat gawai di era masa kini, salah satunya dipengaruhi oleh orang-orang di seluruh dunia yang semakin mengandalkan baterai yang dapat diisi ulang dayanya untuk mengoperasikan berbagai gawai yang biasa kita gunakan seperti ponsel, tablet, komputer, laptop, dan perangkat elektronik portabel lainnya. Salah satu jenis baterai yang dapat diisi ulang dan sering digunakan dalam perangkat elektronik portabel lainnya ialah *lithium-ion* yang biasa dikenal dengan baterai *Li-ion*. Ada dua jenis baterai berbasis lithium, *Lithium Primer* (logam) dan *Lithium Ion*. Baterai *Lithium Primer* mulai menggantikan baterai alkaline yang umum digunakan karena lebih tahan lama. Sementara baterai Lithium-Ion dapat diisi ulang dan digunakan dalam perangkat vaping, banyak elektronik pribadi seperti ponsel, tablet, dan laptop, *E-Bikes*, sikat gigi elektrik, peralatan, *hoverboard*, skuter, dan untuk penyimpanan cadangan tenaga surya (DEC Vermont, 2017). Seiring kemajuan industri, semakin banyak produk yang akan menggunakan baterai yang kuat ini.

Pasar global yang berkembang untuk perangkat elektronik portabel dan baterai isi ulang ini mendorong meningkatnya permintaan untuk ekstraksi Kobalt. Kobalt (Co) adalah logam yang digunakan dalam berbagai aplikasi komersial, industri, dan militer, banyak di antaranya strategis dan kritis. Secara global,

penggunaan utama kobalt adalah pada elektroda baterai yang dapat diisi ulang. *Superalloy* (paduan super), yang digunakan untuk membuat suku cadang untuk mesin turbin gas, adalah penggunaan utama lainnya untuk kobalt. Kobalt juga digunakan untuk membuat *airbag* di mobil, katalis untuk industri minyak dan kimia, karbida disemen (juga disebut logam keras) dan alat berlian, paduan tahan korosi dan aus, bahan pengering untuk pewarna dan pigmen, lapisan tanah untuk enamel porselen, baja berkecepatan tinggi, media perekaman magnetik, dan ban radial berikat baja (U.S. Geological Survey, 2021).

Penggunaan kobalt dapat dibagi menjadi dua segmen besar, kimia dan metalurgi. Kobalt untuk aplikasi kimia didominasi oleh segmen baterai isi ulang sementara penggunaan Kobalt untuk penggunaan metalurgi terutama dalam paduan suhu tinggi (*Superalloys*). Total permintaan kobalt melebihi 120.000 ton per tahun pada tahun 2020, naik sekitar 30% dari 93.950 ton yang dikonsumsi pada tahun 2016. Ekspektasi untuk konsumsi baterai yang diproyeksikan akan mencapai 60% dari semua permintaan kobalt pada tahun 2020, mewakili peningkatan 58% dalam permintaan baterai dari tingkat 2016 (Global Energy Metals Corp., 2020).

**Grafik 1.1 Infografis Permintaan Penggunaan Kobalt**



Sumber: Global Energy Metal Corp. 2020

Pertumbuhan konsumsi baterai ini terutama berasal dari peningkatan permintaan kendaraan listrik. Segmen baterai isi ulang telah menjadi penggunaan

akhir kobalt yang terbesar dan berpotensi tumbuh paling cepat. Penggunaan baterai *lithium-ion* di pasar kendaraan listrik telah menjadi pendorong pertumbuhan paling penting untuk permintaan kobalt disamping pertumbuhan produksi perangkat gawai portabel seperti ponsel, laptop, maupun tablet (Global Energy Metals Corp., 2020).

Meskipun kobalt tidak terlalu langka, menempati peringkat ke-32 dalam urutan ketersediaan global di antara logam lainnya, kobalt telah menjadi komoditas yang semakin penting karena penggunaannya (Statista, 2020). Sejauh ini, lebih dari separuh total pasokan Kobalt di seluruh dunia berasal dari Republik Demokratik Kongo (RDK) diikuti oleh Rusia, Australia, Filipina, dan Kuba (Pistilli, 2021a). Republik Demokratik Kongo (RDK) sejauh ini merupakan produsen kobalt terbesar di dunia, menyumbang sekitar 60 persen dari produksi global. Negara ini telah menjadi produsen utama selama beberapa waktu, meskipun produksinya menurun dari 100.000 MT pada 2019 menjadi 95.000 MT pada 2020 (Pistilli, 2021a). Menurut perkiraan pemerintah RDK, 20% kobalt yang saat ini diekspor dari RDK berasal dari penambang artisanal (penambang kecil/mandiri) (Pistilli, 2021b) di bagian selatan negara itu. Ada sekitar 110.000 hingga 150.000 penambang artisanal di wilayah ini, yang bekerja berdampingan dengan operasi industri yang jauh lebih besar (Bijaoui, 2017).

Ketika permintaan kobalt meningkat, perhatian yang meningkat diarahkan ke RDK. RDK sendiri merupakan salah satu negara yang dianggap miskin di dunia. Pada tahun 2018, diperkirakan 73% populasi Kongo, setara dengan 60 juta orang, hidup dengan kurang dari \$1,90 per hari (tingkat kemiskinan internasional) (The World Bank, 2021). Dengan demikian, sekitar satu dari enam orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tinggal di RDK. Mereka telah menderita perang selama beberapa dekade dan pemerintahan yang buruk sehingga pertambangan artisanal menjadi sumber mata pencaharian banyak masyarakat disana ketika perusahaan tambang terbesar milik negara runtuh pada tahun 1990-an. Keadaan ini semakin parah selama Perang Kongo Kedua (1998 – 2003) ketika Presiden Laurent Kabila mendorong orang untuk menggali sendiri karena pemerintah tidak dapat menghidupkan kembali industri pertambangan yang membuat semakin meningkatnya jumlah penambang artisanal di RDK (Amnesty International, 2017).

**Tabel 1.1 Produksi Tambang Kobalt di Demokratik Republik Kongo  
dari 2010 - 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah *(dalam <i>metric tons</i>)</b>
2010	60.000
2011	60.000
2012	51.000
2013	54.000
2014	63.000
2015	63.000
2016	66.000
2017	73.000
2018	104.000
2019	100.000
2020	95.000

Sumber: Statista & USGS - Mineral Commodity Summaries. 2021

Penambang artisanal ini, yang disebut sebagai “*creuseurs*” di RDK, menambang dengan tangan menggunakan alat seadanya untuk menggali batu dari terowongan jauh di bawah tanah. Penambang artisanal ini termasuk anak-anak, orang tua, dan wanita. Mereka mengambil batu yang mengandung kobalt dari produk sampingan pertambangan industri yang ditinggalkan dan mencuci serta menyortir bijih sebelum dijual.

Pada awal 2000-an, *World Bank* dan *International Monetary Fund* mendukung RDK dalam proses reformasi pertambangan dengan tujuan, antara lain, untuk menarik investasi asing dan dengan demikian mengatasi kemerosotan industri pertambangan. Pemerintah pun mengeluarkan undang-undang pertambangan baru 2002 *The Mining Code* yang menghapuskan monopoli negara atas konsesi pertambangan dan mempercepat pengembangan usaha patungan, yang menguntungkan investor swasta (Ndagano et al., 2020).

Salah satu isi dari *the Mining Code* juga menetapkan bahwa penambangan artisanal hanya dapat dilakukan di *Zones d'exploitation artisanale* (Zona Pertambangan Artisanal atau ZEA) yang terbatas dan bahwa semua penambang

harus terdaftar. Namun, pembangunan kembali pertambangan industri membawa konsekuensi berat bagi penambang artisanal ini termasuk pemindahan paksa, konflik antara perusahaan industri, dan pasukan keamanan maupun kelompok militer (Ndagano et al., 2020).

Hal ini tentu menyebabkan banyaknya penambang artisanal yang diusir dari banyak lokasi penambangan yang tersedia. Kebanyakan dari mereka akhirnya bekerja di area ilegal dan tidak diatur, atau bekerja di lahan yang dikuasai oleh perusahaan pertambangan industri. Pengelolaan dan operasi penambangan artisanal ini bervariasi dari satu tempat penambangan ke situs penambangan lainnya. Misalnya, orang dewasa dan anak-anak secara pribadi mengambil batu di dekat permukaan tempat mereka bekerja untuk konsesi pertambangan industri. Beberapa dari mereka adalah pekerja upahan dan mendapatkan bayaran dari pemilik tanah tempat mereka bekerja, sementara yang lain bekerja dalam tim atau berbagi pendapatan dengan pemilik tambang (Amnesty International, 2016).

Sejak masyarakat internasional mengandalkan baterai yang berisi kobalt ini, banyak pabrik transportasi telah mengembangkan model listrik maupun pabrik gawai yang semuanya dapat didukung oleh baterai ini. Namun, memproduksi baterai membutuhkan banyak sumber daya dan permintaan Kobalt pun akhirnya semakin melonjak. Untuk memenuhi permintaan itu, para penambang artisanal di RDK harus menggali lebih dalam dengan peralatan seadanya, bekerja dalam kondisi yang mengerikan dan dengan risiko yang mengancam kematian (Amnesty International, 2016).

Beberapa pekerja seperti anak-anak mengatakan, bahwa mereka telah dipukuli saat dipekerjakan oleh perusahaan pertambangan. Petugas keamanan juga meminta uang dari mereka. Kebanyakan anak menunjukkan bahwa mereka berpenghasilan antara DCF 1.000-2.000 per hari (US \$ 1-2) dimana saat mereka diberi upah, mereka tidak memiliki pengetahuan untuk memverifikasi berat karung atau nilai bijih Kobalt sehingga harus menerima apa yang dibayar pedagang kepada mereka, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi (Amnesty International, 2016).

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat, ada beberapa penelitian yang membahas isu ini dari berbagai perspektif. Pertama, ada beberapa penelitian

sebelumnya memperkenalkan bagaimana perdagangan kobalt di RDK. Beberapa hal yang disorot antara lain adalah mengenai perdagangan kobalt yang berlangsung di DRK. Menggunakan tulisan dari salah satu bab dari buku *The Material Basis of Energy Transitions* yang dieditori oleh Alena Bleicher dan Alexandra Pehlke. Pada bagian *Chapter 10 - Conflicts related to resources: The case of cobalt mining in the Democratic Republic of Congo* (2020) yang ditulis oleh Louisa Prause menganalisis konflik yang terkait dengan produksi kobalt untuk digunakan dalam baterai *litium-ion* di berbagai titik jaringan produksi global. Kobalt sebagai bahan mentah utama yang dibutuhkan dan penambangannya terkonsentrasi di RDK. Peningkatan permintaan kobalt telah mengubah penambangan di RDK dan menyebabkan berbagai jenis konflik. Kobalt yang ditambang secara artisan (tradisional) dan industri dari RDK terutama diekspor ke Cina, sementara sebagian kecil diekspor ke Finlandia. Cina telah menjadi produsen kobalt olahan terbesar. Perusahaan penyulingan kobalt terbesar adalah Zhejiang Huayou Cobalt Company Ltd (Huayou) yang berbasis di Cina, yang juga memproses kobalt yang ditambang di RDK.

Prause melihat transisi energi sangat bergantung pada keamanan pasokan berbagai logam. Hal ini akan mengarah pada terbukanya wilayah baru untuk pertambangan industri dan artisanal. Di sini, perluasan perbatasan pertambangan kerap memicu konflik. Meningkatnya permintaan kobalt untuk produksi baterai *lithium-ion* telah berkontribusi pada perluasan pertambangan kobalt industri dan artisanal di RDK dan dengan demikian juga pada transformasi fisik, ekonomi, dan sosial di area pertambangan tembaga-kobalt. Ada dua jenis konflik utama di RDK, pertama, konflik antara penambang artisanal dan perusahaan industri mengenai akses ke situs penambangan tradisional. Kedua, konflik antara masyarakat tuan rumah lokal dan perusahaan pertambangan industri mengenai distribusi manfaat yang diperoleh dari pertambangan industri, terutama terkait dengan penciptaan dan distribusi kesempatan kerja (Prause, 2020).

Hal ini nampaknya sepemikiran dengan pemikiran Brett Zeuner yang ia tulis dalam *An Obsolescing Bargain in a Rentier State: Multinationals, Artisanal Miners, and Cobalt in the Democratic Republic of Congo* (2018) setelah meneliti kobalt yang bersumber dari bekas wilayah Katanga di RDK menjadi baterai *lithium-*

ion yang dapat digunakan berulang dan sistem energi terdistribusi. Zeuner menggunakan dua teori, *Rentier State*, dan *Obsolescing Bargaining*, diterapkan pada kasus operasi penambangan kobalt multinasional dan artisanal di sana dan menunjukkan bahwa ada hubungan antara pilihan konsumen di kota dan negara kaya dengan dampak aktual terhadap komunitas sumber daya alam yang dibutuhkan untuk produk ini seringkali melemah. Zeuner melihat bahwa ekstraksi kobalt melalui kemitraan antara perusahaan pertambangan multinasional dan pemerintah memperkuat ketidakstabilan politik dan korupsi. Ini penting karena terkait dengan insiden konflik di masa depan dan maraknya penambangan kobalt artisanal. Karena para penambang artisanal ini bergantung pada pekerjaan yang kemudian menurunkan kualitas hidup mereka (Zeuner, 2018).

Adapun beberapa penelitian yang membahas mengenai respon RDK terhadap Perdagangan Kobalt. Tulisan ketiga dari Benjamin K. Sovacool berjudul *The precarious political economy of cobalt: Balancing prosperity, poverty, and brutality in artisanal and industrial mining in the Democratic Republic of the Congo*. Studi ini mengkaji ekonomi politik pertambangan kobalt di Republik Demokratik Kongo (2019). Di sana, ledakan penambangan kobalt sedang berlangsung, didorong oleh meningkatnya permintaan global yang dibutuhkan untuk baterai dan perangkat digital modern lainnya. Berdasarkan penelitian lapangan yang ekstensif dan wawancara (ahli, komunitas dengan penambang dan pedagang, dan pengamatan naturalistik di 21 tambang dan 9 lokasi pertambangan yang berafiliasi). Hasilnya mendokumentasikan enam manfaat yang saling terkait untuk penambangan kobalt, termasuk pengentasan kemiskinan, pengembangan masyarakat, dan stabilitas kawasan, di samping enam tantangan serius, termasuk kecelakaan dan bahaya pekerjaan, pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat yang menurun, dan konflik kekerasan dan kematian. Kemudian mengusulkan tujuh rekomendasi kebijakan untuk berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti pemerintah lokal dan nasional, perusahaan pertambangan industri (dan seringkali asing), penambang dan komunitas mereka, dan produsen produk elektronik yang menggunakan kobalt. Studi ini terutama berupaya memansiakan pengalaman hidup penambangan kobalt Kongo, dan untuk

mengungkap ketegangan dan pengorbanan yang terkait dengan ledakan pertambangan baru-baru ini.

Hal serupa juga ditemukan di tulisan sebelumnya dari salah satu bab dari buku *Mining in Africa* yang dieditori oleh Bonnie Campbell, pada bagian bab lima *Governance, Human Rights And Mining in The Democratic Republic Of Congo* (2009) yang ditulis oleh Marie Mazalto. Mazalto menganalisis bahwa hak asasi manusia di RDK sulit dilaksanakan karena tidak hanya mempertanyakan kapasitas sektor pertambangan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan tetapi juga untuk mengevaluasi pengalaman negara ini terkait dengan program pembangunan yang direkomendasikan oleh lembaga pendanaan multilateral.

Dalam jangka pendek di RDK, upaya untuk memulihkan supremasi hukum tampaknya bergantung pada pencapaian kriteria kinerja dan peningkatan tata kelola perusahaan. Hak asasi manusia, yang diterjemahkan ke dalam bahasa standar pembangunan untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik, dapat berkontribusi untuk memperkuat legitimasi kegiatan pelaku ekonomi dan negara tertentu. Tetapi masalah hak, yang pada hakikatnya bersifat sosial, budaya, dan politik, jauh melampaui perspektif manajerial tersebut. Paradoksnya, dan di luar rekomendasi EIR, dimensi-dimensi ini tampaknya telah diberikan prioritas yang relatif rendah dalam program pembangunan yang sekarang diterapkan di sektor pertambangan Kongo.

Terakhir adalah kelompok literatur mengenai penambang artisanal di RDK. Bagian ini selanjutnya yang mana membahas mengenai penambang artisanal yang dimulai dari laporan yang ditulis oleh tim campuran dari Belgium beranggotakan Ce'lestin Lubaba Nkulu Banza, Tim S. Nawrot, Vincent Haufroid, Sophie Decre'e, Thierry De Putter, Erik Smolders, Benjamin Ilunga Kabyla, Oscar Numbi Luboya, Augustin Ndala Ilunga, Alain Mwanza Mutombo, Benoit Nemery berjudul *High human exposure to cobalt and other metals in Katanga, a mining area of the Democratic Republic of Congo* (2009). Mereka melihat dampak terhadap kesehatan manusia dari penambangan dan pemrosesan logam di *African Copperbelt*. Studi ini menilai paparan logam pada populasi Katanga, di tenggara Republik Demokratik Kongo, menggunakan *biomonitoring* dengan tes urin pada 351 subjek (32% wanita), berusia 2–74 tahun (rata-rata 33 tahun). Empat puluh subjek (kontrol)

tinggal 400 km di luar area pertambangan, 311 subjek tinggal di area pertambangan, baik sangat dekat atau cukup dekat dengan tambang atau pabrik peleburan. Hasilnya, konsentrasi urin secara signifikan lebih tinggi pada subjek dari daerah pertambangan dibandingkan subjek kontrol. Studi *biomonitoring* pertama dari paparan logam di *African Copperbelt* mengungkapkan paparan substansial terhadap beberapa logam, terutama pada anak-anak. Konsentrasi karbonmonoksida pada urin yang ditemukan di populasi ini adalah yang tertinggi yang pernah dilaporkan untuk populasi umum. Meski demikian, jalur paparan dan signifikansi kesehatan dari temuan ini perlu diselidiki lebih lanjut.

Selanjutnya, Christian Bwenda, Lydie Musas, Espérance Sikyala, dan André Tumba berjudul “*Go ahead, try to accuse us... ” Human rights violations by Chinese mining companies in the Democratic Republic of Congo: The case of China Nonferrous Metal Mining Co* (2018). Laporan ini merupakan hasil akhir dari penelitian kepatuhan terhadap pedoman yang dikeluarkan oleh CCMC oleh perusahaan pertambangan Cina yang didirikan di RDK. Studi tersebut difokuskan pada kasus perusahaan CNMC Huachin Mabende, yang menambang tembaga dan kobalt di wilayah Mabende, Penelitian selesai pada Juli 2017 hingga September 2018 menemukan bahwa CNMC Huachin bersalah atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia di komunitas lokal Mabende dan dengan para pekerja mereka yang berkewarganegaraan Kongo. Pelanggaran yang diamati terutama: pelanggaran kebebasan bergerak, pelanggaran hak untuk mengakses air minum, pelanggaran hak atas reparasi dan pemulihan penghidupan, pelanggaran hak atas informasi dan konsultasi, pelanggaran hak untuk bekerja dan upah yang sama, pelanggaran serikat dan hak atas jaminan social, pelanggaran hak atas lingkungan yang aman, dan yang terakhir pelanggaran hak untuk menerima pendapatan dari ekstraksi.

Penelitian ketujuh yang diteliti oleh Nicolas Tsurukawa, Siddharth Prakash, dan Andreas Manhart dengan judul *Social impacts of artisanal cobalt mining in Katanga, Democratic Republic of Congo* (2011) juga menemukan penambangan kobalt artisanal diperkirakan menyediakan lapangan kerja bagi antara 67.000 dan 79.000 penambang permanen tetap. Saat *peak season*, jumlah penambang mencapai 90.000 hingga 108.000 pekerja. Sekitar 74% penambang adalah penggali sementara sisanya adalah penyortir dan mencuci logam. Kontribusi penambangan kobalt

artisanal bagi perekonomian nasional dinilai dengan dua metode berbeda. Dari segi kondisi kerja, penambang rentan terhadap bahaya longsor, terutama saat hujan musim. Tingkat kematian tahunan mencapai 0,4 hingga 0,5% dari angkatan kerja dilaporkan di beberapa tambang. Belum lagi penambang ini terkena logam berat melalui penghirupan debu, kontaminasi makanan dan air. Dibandingkan dengan sektor swasta formal, diperkirakan 13 hingga 20 jam atau 35 hingga 52% lembur per minggu biasanya dilakukan oleh penambang artisanal. Ditemukan juga penambang dan perburuhan anak yang meluas berlaku: antara 19.000 dan 30.000 anak di bawah 15 tahun, dan 9.000 hingga 15.000 anak berusia antara 15 dan 17 tahun diperkirakan akan bekerja di tambang kobalt artisanal. Mayoritas anak-anak yang lebih kecil melakukan tugas-tugas mudah seperti pemilahan bijih dan pencucian. Dari usia 15 atau 16 tahun, laki-laki muda bekerja di pertambangan. Meski demikian, anak kecil juga dilaporkan dikirim untuk menggali di galeri sempit dan berbahaya, yang mereka miliki akses yang lebih mudah daripada orang dewasa.

Kedua penelitian diatas ini sesuai dengan ulasan Ruben De Koning yang mana tulisannya berjudul *Artisanal mining and post-conflict reconstruction in the Democratic Republic of the Congo* (2009). Ia memantau setidaknya selama dua dekade sumber daya mineral telah menjadi kutukan daripada menjadi berkat di RDK karena walaupun perang saudara secara resmi berakhir 2003, konflik bersenjata terus berlanjut di timur negara itu. Saat negara untuk sementara waktu sangat termiliterisasi, mengakibatkan hal yang parah untuk tata kelola sumber daya mineral. Kemampuan kelompok bersenjata untuk pendapatan sumber daya akses semakin tinggi dan membahayakan upaya pembangunan perdamaian. Sementara itu, penambang artisanal, yang mengekstrak hingga 90 persen mineral, mengalami kemiskinan berkelanjutan karena militer pemerasan dan bentuk lain eksploitasi tenaga kerja. Membangun kembali kontrol sipil di atas area pertambangan militer harus menjadi prioritas pertama untuk Pemerintah RDK. Tetapi harus segera diikuti dengan upaya memformalkan rantai komoditas, dari situs pertambangan artisanal ke perdagangan internasional dan perusahaan pengolahan. Saat ini, upaya formalisasi oleh pemerintah dan donor telah fokus pada ekspor tingkat nasional. Sedikit yang telah dilakukan memperjelas dan memperkuat hak penambang

artisanal di tingkat produksi. Kecuali ini tercapai, praktek bisnis yang akan bertanggung jawab praktek tetap sulit dilakukan.

Kelompok Militer ini juga dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang juga khawatir dengan kelompok militer ini juga terlihat dalam laporan *Mapping artisanal mining areas and mineral supply chains in Eastern DR Congo Impact of armed interference & responsible sourcing* yang ditulis oleh Ken Matthysen, Steven Spittaels, dan Peer Schouten (2019). Laporan tersebut memberikan angka rinci tentang tingkat campur tangan bersenjata di berbagai provinsi di RDK. Frekuensi gangguan bersenjata di lokasi penambangan paling tinggi di Kivu Utara, Kivu Selatan dan Ituri. Di Kivu Utara, beberapa kelompok bersenjata non-negara masih ikut campur di sektor pertambangan termasuk *Mai Mai Simba*, yang dikomandoi oleh Mando, dua faksi *Nduma Defense of Congo* (NDC), dan milisi *Nyatura*. Namun, secara keseluruhan, *Forces armées de la république démocratique du Congo* atau unit tentara Kongo (FARDC) adalah penyebab utama campur tangan bersenjata, di 66% lokasi penambangan yang terkena dampak (198 dari 265) dalam sampel 2016-2018 yang mereka ambil. Dalam banyak kasus, kelompok bersenjata seperti ini tidak memiliki kendali langsung atas lokasi penambangan, tetapi menemukan cara lain yang lebih tidak langsung untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan penambangan rakyat (seperti pemasangan penghalang jalan).

Namun ada juga beberapa kasus dimana aktor militer ini memiliki kendali langsung karena ditempatkan dekat tambang rakyat. Seperti yang tertulis dalam *Congo Blues: Scoring Kabila's Rule* milik Pierre Englebert (2016) yang melihat bahwa para kelompok militer ini mengambil hingga 80 persen dari pendapatan para penambang artisanal melalui pajak dan pemerasan ilegal yang substansial. Setidaknya satu kelompok bersenjata hadir di lebih dari 50 persen tambang rakyat di wilayah bagian timur, dan FARDC hadir di sepertiganya. Di lain waktu, mereka menjadi penadah dari para penambang dengan harga yang murah untuk dijual kembali ke konsumen (para perusahaan multinasional). Mereka mungkin juga menggali mineral sendiri atau memaksa penambang lokal menjadi kerja paksa.

Dari temuan-temuan yang ada dalam laporan-laporan yang dilihat dari penelitian sebelumnya penulis memperlihatkan adanya celah yang belum dibahas

yaitu mengenai kecenderungan pemerintah RDK memayoritaskan masyarakat mereka untuk bekerja di sektor pertambangan, namun tanpa adanya dukungan maupun kebijakan solutif terhadap konflik yang menyimpannya. Disini penulis sendiri memfokuskan untuk memperlihatkan bagaimana bahwa perdagangan internasional, dalam hal ini yang mendorong pertambangan kobalt, juga memiliki peran penting terhadap kegiatan para penambang artisanal di lapangan dan dampaknya terhadap penegakan HAM di RDK.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dengan mengacu kepada penjelasan dalam latar belakang sebelumnya, penulis akan berusaha menjawab pertanyaan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: *Bagaimana kehadiran pertambangan kobalt di Republik Demokratik Kongo terhadap penerapan hak asasi manusia penambang artisanal di era pemerintahan Félix Tshisekedi*

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai isu kontemporer dalam hubungan internasional, yakni mengenai hak asasi manusia dalam bentuk standar pelanggaran terhadap hak-hak pekerja internasional
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi para penambang artisanal terkait penambangan yang dilakukan, khususnya di Republik Demokratik Kongo.
3. Menjelaskan mengenai dampak perdagangan Kobalt sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Republik Demokratik Kongo, khususnya kepada para penambang artisanal.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menggunakan kajian–kajian yang ada dalam Hubungan Internasional untuk menjelaskan bagaimana perdagangan Kobalt secara global dapat memberi dampak kepada penegakan HAM di Republik Demokratik Kongo. Sehingga para akademisi, pihak swasta, dan masyarakat umum selaku konsumen lebih bijak dalam membuat maupun memakai perangkat gawainya masing-masing.
- b. Secara akademik, manfaat penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan dan berkontribusi bagi ilmu Hubungan Internasional.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian–bagian yang terdiri dari beberapa bab. Sistematikanya disusun berdasarkan pembaban sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini, penulis menguraikan konsep dan argumen utama yang akan didukung dengan teori-teori sebagai acuan dalam menganalisis penelitian tersebut. Adapun konsep teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengenai Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) dan *International Labour Standart Human Rights* untuk membentuk gambaran umum dari alur berpikir penelitian hingga menghasilkan jawaban dan temuan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian bab ini berisikan tentang metode penelitian yang penulis gunakan. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis meliputi objek dan jenis

penelitian yang dipakai, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data serta rencana waktu penelitian.

#### BAB IV HUBUNGAN PARA AKTOR (NEGARA, PERUSAHAAN MULTINASIONAL, DAN PEKERJA) TERKAIT PENAMBANGAN KOBALT PASCA 2002

Bab IV akan terdiri dari sub-bab yang pertama menjelaskan bagaimana hubungan para aktor yang terlibat dalam penambangan Kobalt setelah keluarnya aturan baru, *The Mining Code* pada tahun 2002. Kedua, mengenai situasi yang berkejolak di Republik Demokratik Kongo sebagai *main supply chain* Kobalt di tingkat global.

#### BAB V EKSPLOITASI TERHADAP PENAMBANG ARTISANAL AKIBAT MASIFNYA PERMINTAAN KOBALT

Bab V ini akan berisikan mengenai dua pembahasan. Pertama mengenai bagaimana eksploitasi terhadap penambang artisanal bisa terjadi dikarenakan permintaan Kobalt secara global kian terus meningkat. Lalu yang kedua yaitu, keterkaitan perdagangan kobalt secara global dengan pelanggaran HAM kepada penambang artisanal dalam prosesnya. Sehingga mengkaji mengenai memang adanya hubungan perdagangan Kobalt secara global dengan pelanggaran HAM yang terjadi kepada para penambang artisanal dalam prosesnya, khususnya di era pemerintahan Félix Tshisekedi.

#### BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang berisi serangkaian argumen terakhir dari peneliti setelah melakukan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah diawal. Kesimpulan menjadi tesis (argumen teoritik) yang merangkum dan menyederhanakan pembahasan dengan mempertimbangkan kerangka berfikir, sementara saran menjelaskan tentang usulan dan pendapat peneliti berkaitan upaya pemecahan masalah penelitian.